



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT KOTA BESAR SURABAYA
Jalan Taman Sikatan 1, Surabaya 60175

Surabaya, 8 Mei 2017

Nomor : B/2370 N/2017/Bagops
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi.

Kepada

Yth. WALIKOTA SURABAYA

di

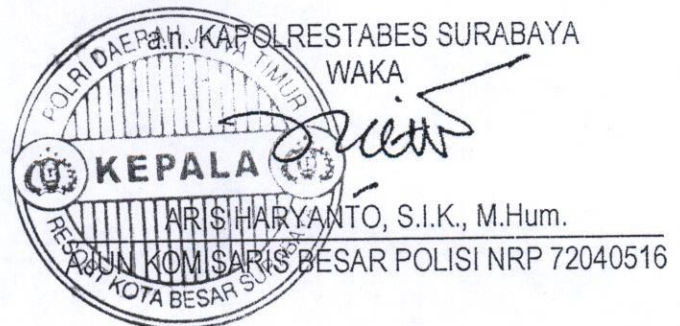
Surabaya

u.p. Kepala Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah Kota Surabaya

1. Rujukan informasi khusus Satintelkam Polrestabes Surabaya Nomor : R/Insus – 174/IV/2017/Intelkam, tanggal 19 April 2017 perihal rencana penertiban bangunan di atas tanah yang bukan miliknya terletak di Waduk Watulawang Kel. Made, Kec. Sambikerep Surabaya.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dimohon kepada Sdr. Kepala Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah Kota Surabaya untuk hadir dalam rangka Rapat Koordinasi membahas tentang penegakkan hukum menempati bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, pada :
 - a. hari : Rabu;
 - b. tanggal : 10 Mei 2017;
 - c. waktu : pukul 15.00 Wib;
 - d. tempat : Ruang M. Jasin Polrestabes Surabaya;
 - e. pakaian : Yang berlaku pada hari itu.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kapolda Jatim
2. Irwasda Polda Jatim
3. Karoops Polda Jatim
4. Walikota Surabaya
5. Kapolrestabes Surabaya
6. Kasiwas Polrestabes Surabaya.



ka-Bag OPS → membuka rapat.

Itu yang ada ~~di~~ di situ lada.

PT Citraland.

Itu yang perolehan + sertifikat

- 2014 → warga bangun lapak jualan.
baru merujuk kepada klaim sepihak.

2016 → Mediasi gagal.

Selanjutnya → selokan tanah v/ jualan
(ditolak).

- mohon kebijakan → PT Ciputra Surya
ingin menertibkan PKL → membuat
kehidupannya nyaman.

Pah Gatoe.

2012 → awal (bersambung menjadi 8).

→ minta ~~di~~ di bongkar tidak mau → ada yg mau.

- Peralihan Sadel Sali menurut hukum.

Lurah Made.

- harapan warga RW 06 ingin ada mediasi
ke 2 yg tempatnya di kala RW ~~di~~ beluran.

- PKL nya jadi 9 lapak.

Bag Hukum.

- riwayat pelepasan ke Citraland.
- pamkot menerima surat dari RW 06 kel Made yg
menyampaikan adanya laporan polisi kepada warga made
- sudah diupayakan v/ mengentahkan → tgl 7 juni 2016 (I)
22 Agustus 2016 (II).
- belum ada titik temu antara warga dgn PT Ciputra.

DPBT.

- Banyak juga masalah BHD karena perubahan Desa menjadi kelurahan

Apakah permasalahan ini masuk ke dalam ranah satpo PP? → mail
perlu pengayoman

Simpulan.

1. Status tanah PT Ciputra
2. harus dibedakan antara
masalah PKL dgn selokan PKL.
3. Alas di tolak dgn
mediasi panjang (terakhir,
apabila warga tidak hadir
akan dilakukakan penegakan hukum.